

**MONITORING EFEKTIVITAS LAYANAN SISTEM PEMBAYARAN MENUJU  
DIGITALISASI BANTUAN SOSIAL MELALUI KELUARGA PENERIMA MANFAAT  
(KPM) PROGRAM PKH DAN PROGRAM SEMBAKO**  
(Studi Kasus di Desa Tumbang Manjul Kabupaten Seruyan Kalimantan Tengah)

*MONITORING THE EFFECTIVENESS OF PAYMENT SYSTEM SERVICES TOWARDS  
DIGITALIZATION OF SOCIAL ASSISTANCE THROUGH FAMILY BENEFICIARIES (KPM) OF  
PKH PROGRAM AND SEMBAKO PROGRAM  
(Case Study in Tumbang Manjul Village, Seruyan Regency, Central Kalimantan)*

**Tirsa Neyatri Bandrang**

*Program Studi Pengelolaan Agribisnis Perkebunan, Politeknik Seruyan, Kuala Pembuang  
Jl. Ahmad Yani Kuala Pembuang II, Seruyan Hilir, Seruyan, Kalimantan Tengah, 74215  
[tneyatri.polte@gmail.com](mailto:tneyatri.polte@gmail.com)*

**ABSTRAK**

Program Kementerian Sosial dalam menanggulangi kemiskinan dan untuk meminimalisirkan kendala dalam mengatasi masalah kemiskinan dengan memanfaatkan teknologi yang berkembang pesat saat ini yaitu dengan meluncurkan program PKH dan Program Sembako. Namun, dalam pelaksanaannya, Program PKH dan program sembako ini terkendala dengan sinyal dan jarak yang terlalu jauh dan curam. Tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk memantau seberapa efektif layanan sistem pembayaran dalam rangka kesiapan menuju digitalisasi bantuan sosial melalui Program PKH dan Program Sembako di wilayah Blankspot serta untuk mengetahui sejauhmana program ini sudah efektif terlaksana di wilayah sinyal lemah/ Blankspot (desa Tumbang Manjul Kabupaten Seruyan).

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang tepat terkait pelaksanaan program PKH dan Program Sembako sesuai dengan pedoman pelaksanaannya dengan melakukan wawancara kepada 10 orang KPM yang terdiri dari 5( lima) orang KPM program PKH dan 5( lima) orang KPM program sembako. Lokasi Kec/Desa yang tersebar sesuai dengan data dari Bank Penyalur Bansos yaitu Bank Mandiri..

Hasil kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) layanan sistem pembayaran melalui program PKH dan program sembako di Desa Tumbang Manjul Kabupaten Seruyan ini antara lain perlu peran aktif pendamping dalam mengkoordinir pengambilan bantuan sosial agar memudahkan KPM dalam mengambil bantuan di e warong, KPM kesulitan dalam pengambilan bantuan sosial di Bank penyalur karena lokasi dan tempatnya yang tidak kondusif serta lemahnya sinyal sehingga memutuskan KPM untuk mengambil dana secara kolektif yang dikoordinir oleh pendamping desa.

---

*Kata Kunci : Monitoring, Bansos, PKH, Program Sembako*

**ABSTRACT**

1

The Ministry of Social Affairs program in overcoming poverty and minimizing obstacles in overcoming poverty problems by utilizing technology that is growing rapidly today, namely by launching PKH programs and Basic Food Programs. However, in its implementation, the PKH Program and the Basic Food Program are constrained by signals and distances that are too far and steep. The purpose of this community service activity is to monitor how effective payment system services are to be ready for the digitalization of social assistance through the PKH Program and Basic Food Program in the Blankspot area and to find out how far this program has been effectively implemented in the weak signal / Blankspot area (Tumbang Manjul village, Seruyan Regency).

The research method used is qualitative descriptive to provide an appropriate description and explanation related to the implementation of the PKH program and the Basic Food Program in accordance with the implementation guidelines by conducting interviews with 10 KPM consisting of 5 (five) KPM PKH programs and 5 (five) KPM basic food programs. The location of Kec/Village is spread according to data from the Social Aid Distribution Bank, namely Bank Mandiri.

The results of monitoring and evaluation (monev) activities of payment system services through the PKH program and the basic food program in Tumbang Manjul Village, Seruyan Regency, among others, need an active role of assistants in coordinating the collection of social assistance to make it easier for KPM to take assistance at e warung, KPM has difficulty in taking social assistance at distribution banks because the location and place are not conducive and weak signals so KPM decides to take funds collectively which is coordinated by the village escort.

---

*Keywords:* Monitoring, Social Aid, PKH, Sembako Program

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah yang selalu dihadapi manusia. Masalah kemiskinan memang sama tuanya dengan usia kemanusiaan itu sendiri dan implikasi permasalahan-nya dapat melibatkan berbagai segi kehidupan manusia. Dengan kata lain bahwa kemiskinan ini merupakan masalah sosial yang sifatnya mendunia, artinya masalah kemiskinan sudah menjadi perhatian dunia, dan masalah tersebut ada di semua negara, walaupun dampak dari kemiskinan berbeda-beda (Nurwati, 2008).

Kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang berkaitan dengan ketidakmampuan akses secara ekonomi, politik dan sosial, psikologis. Kemiskinan dapat menghambat pembangunan suatu bangsa, yang berakibat pada tidak terpenuhinya hak-hak manusia. Dampak yang timbul akibat dari kemiskinan bersifat menyebar (*multiplier effects*) terhadap tatanan kemasyarakatan secara menyeluruh. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi melakukan berbagai cara untuk memberantas kemiskinan, salah satunya dengan mengeluarkan kebijakan pro masyarakat miskin yang diwujudkan dalam bentuk Program Keluarga Harapan (PKH) (Candra, 2019).

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu penanganan fakir miskin, diolah oleh pusat data dan informasi kesejahteraan sosial dan ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH. Program pemerintah yang berpihak pada masyarakat miskin, diharapkan mampu meningkatkan Kesejahteraan bahkan mengentaskan permasalahan kemiskinan. Merespon permasalahan kemiskinan, PKH bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH (Rachman *et al.*, 2018). Sebagai upaya

percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 Kementerian Sosial Repub<sup>1</sup> Indonesia menggulirkan Program Keluar<sup>2</sup>

Harapan (PKH) di pelosok daerah-daerah yang berada Indonesia agar lapiran masyarakat miskin dapat ikut melaksanakan PKH. Program Perlindungan Sosial yang juga dikenal di dunia internasional dengan istilah Conditional Cash Transfers (CCT) ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi di negara-negara tersebut, terutama masalah kemiskinan kronis (Nurul Najidah *dan* Hesti Lestari, 2019).

Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar mereka. Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden RI. Melalui PKH, keluarga penerima manfaat didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan. PKH diarahkan untuk menjadi episentrum dan *center of excellence* penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional. Misi besar PKH untuk menurunkan kemiskinan semakin mengemuka mengingat jumlah penduduk miskin Indonesia sampai pada Maret Tahun 2016 masih sebesar 10,86% dari total penduduk atau 28,01 juta jiwa (Mukrimaa *et al.*, 2016).

Pemerintah telah menetapkan target penurunan kemiskinan menjadi 7-8% pada tahun 2019, sebagaimana tertuang di dalam RPJMN 2015-2019. PKH diharapkan dapat berkontribusi secara signifikan untuk menurunkan jumlah penduduk miskin,

menurunkan kesenjangan (gini ratio) seraya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 2015). Hasil penelitian lain menunjukkan bahwa PKH memberikan dampak terhadap perubahan konsumsi rumah tangga, seperti di beberapa negara pelaksana CCT lainnya. PKH berhasil meningkatkan konsumsi rumah tangga penerima manfaat di Indonesia sebesar 4,8%. (Mukrimaa *et al.*, 2016). Bantuan PKH yang diberikan pemerintah kepada KPM merupakan bantuan Pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan/e-warong yang bekerjasama dengan bank. Bantuan pangan non tunai (BPNT) merupakan kebijakan pemerintah dalam upaya penanggulangan kemiskinan dengan metode non tunai, yang mana bantuan tersebut merupakan kebutuhan pokok (beras dan telur). Program bantuan pangan non tunai ini juga diperkuat dengan instrumen presiden republik Indonesia (RI) dan kabinet tentang keuangan inklusif yang di selenggarakan pada 26 April 2016 memberikan arahan agar bantuan sosial dan subsidi disalurkan secara non tunai agar tidak terjadinya penyimpangan tujuan program BPNT (Kuddus, 2019).

Harapan dari mekanisme penarikan bantuan sosial non tunai ini melalui kartu KPM yang terdaftar yaitu dapat meningkatkan ketepatan sasaran dan efektivitas bantuan, serta meningkatkan akses masyarakat kurang mampu terhadap layanan keuangan formal. setiap bantuan sosial dan subsidi disalurkan secara non-tunai dan menggunakan sistem perbankan untuk kemudahan mengontrol, memantau, dan mengurangi penyimpangan. Penggunaan sistem perbankan dapat dicairkan dengan memanfaatkan keuangan digital yang dimaksudkan untuk mendukung perilaku produktif dan memperluas inklusif keuangan. Kelompok masyarakat miskin akan mendapatkan electronic voucher (*e-voucher*) dalam bentuk kartu, dan dapat membeli

beras sesuai dengan kualitas yang diinginkan dan dapat dikombinasikan untuk pembelian bahan pangan lainnya yang sudah ditentukan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Kekuatan bantuan sosial pangan non tunai ini adalah penerima manfaat secara efisien dan efektif mampu mengoptimalkan bantuan yang diberikan berdasarkan tingkat kebutuhannya sehingga secara tidak langsung dapat menggairahkan kehidupan ekonomi yang bersangkutan, terjadinya proses internalisasi keuangan inklusif kepada fakir miskin melalui revitalisasi peran lembaga perbangkan, terhindarnya sejumlah kasus inefisien dan ineaktivitas sebagaimana penyaluran bantuan sosial pangan sebelumnya dan memerlukan manajemen yang baru (Fadlurrohim *et al.*, 2020)

Dalam mendukung penyaluran bantuan pangan non tunai PKH secara luas maka dipandang perlu melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan konsepnya. Daerah pemetaan yang menjadi tempat survey monitoring dan evaluasi di Kalimantan Tengah yaitu desa Tumbang Manjul Kabupaten Seruyan. Desa ini merupakan desa yang berada di wilayah dengan sinyal lemah atau tanpa sinyal (*blankspot*).

Monitoring dan Evaluasi Program Bansos Non Tunai di Kalimantan Tengah ini dilaksanakan dalam rangka mengawasi dan mengevaluasi pemahaman terhadap layanan transaksi sistem penyaluran Bansos Non tunai menuju digitalisasi. Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang menjadi sasaran peneliti adalah seberapa efektifnya sistem digitalisasi ini bagi keluarga penerima manfaat di Desa Tumbang Manjul Kabupaten Seruyan Kalimantan Tengah yang merupakan desa dalam wilayah Blankspot untuk :

- a. Program PKH ?
- b. Program Sembako ?

## METODOLOGI

Metode yang digunakan dalam monitoring dan evaluasi bansos melalui PKH ini adalah metode campuran (*mixed method*) kuantitatif dan kualitatif. Metode kuantitatif menggunakan kuesioner sedangkan kualitatif dilakukan dengan wawancara terstruktur. Kegiatan Pengabdian dan pemberdayaan masyarakat mengenai monitoring bansus PKH dilakukan di Desa Tumbang Manjul Kabupaten Seruyan yang merupakan desa dalam wilayah sinyal lemah (*Blankspot*).

Tahapan pelaksanaan Pengabdian masyarakat yang dilakukan, melalui program Bansos non tunai ini antara lain :

- (1) Melakukan sosialisasi kepada warga berkaitan dengan peranan E-warong sebagai media penyulur atau pendistribusian Bansos Non Tunai.
- (2) Melakukan monitoring dan evaluasi E Warong
- (3) Mentabulasi data yang telah diisi ke dalam laporan deskriptif.

### Pemilihan Sampel

Pemilihan sampel digunakan dengan metode *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel yang berdasarkan pertimbangan tertentu. Sampel juga harus *representative/mewakili* populasi yang akan diteliti dengan ketentuan :

1. KPM PKH dan KPM Program Sembako :
  - a. Usia maksimum 55 Tahun
  - b. Wanita
  - c. Minimal telah 3 kali mendapatkan Bansos PKH
  - d. Berdomisili di wilayah Survey (Desa Tumbang Manjul)

Jumlah responden yang menjadi sampel dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berjumlah 10 orang yang terdiri dari 5 responden penerima PKH dan 5 responden penerima program sembako.

### Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan kegiatan 16 September s.d 30 September 2021.



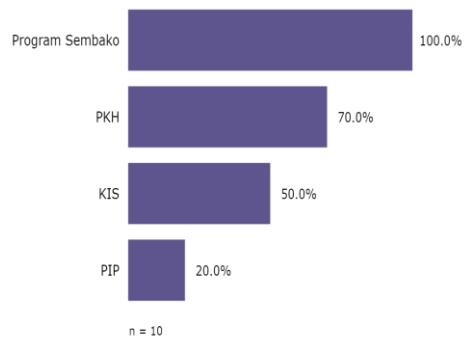
**Gambar 1.** Wawancara dengan responden Program PKH



**Gambar 2.** Wawancara dengan responden Program Sembako

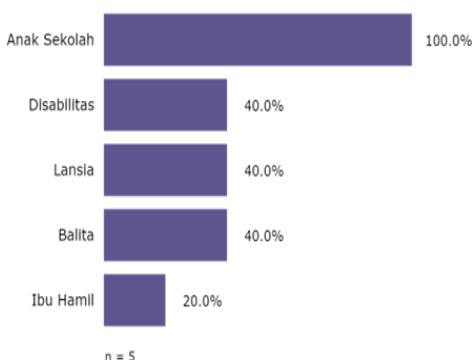
## HASIL PEMBAHASAN

### Profil Responden



**Gambar 3.** Profil Respon KPM Desa Manjul

Jumlah KKS yang dimiliki oleh penerima PKH dan Program Sembako secara bersamaan yaitu 1 orang. Faktor penerima bantuan PKH kebanyakan untuk keperluan sekolah yaitu sebanyak 100%

**Gambar 4.** Faktor penerima KKS

Frekuensi pengambilan bantuan sebanyak 2(dua) kali di Bank Mandiri sebagai bank penyalur yang ditunjuk oleh pemerintah. Rata-rata responden adalah sebagai ibu rumah tangga dengan kisaran pendapatan  $\leq$  5 500.000,- / bulan.

**Gambar 5.** Acara Pembukaan Evaluasi Digitalisasi dengan perangkat desa dan Responden KPM .

## 1. Hasil Monev Penyaluran BSNT Wilayah offline/Blankspot

Tumbang Manjul adalah salah satu desa terpencil lokasi desa tumbang manjul adalah salah satu desa yang letak lokasinya di dalam hutan desa di kecamatan Seruan Hulu, Kabupaten Seruan, Kalimantan Tengah.. Menuju ke sana dalam waktu normal memerlukan waktu +/- 12 jam. Kondisi jalan yang rusak serta sinyal menjadi alasan desa ini menjadi salah satu titik desa Blank spot di Kabupaten Seruan. Keberadaan sinyal

komunikasi sangat sulit sekali di Desa ini karena masih 3G. Terkadang ada beberapa desa yang kondisi sinyalnya tidak tersentuh oleh sinyal komunikasi dan hal ini menghambat dalam berkoordinasi.

Tata letak Tumbang Manjul itu sendiri masih berada di tengah hutan dan daerah gunung/berbukit sehingga sulit dijangkau. Adapun jumlah responden yang dimonitoring di Desa Tumbang Manjul ini berjumlah 10 orang yang terdiri dari 5 Orang KPM PKH, 5 Orang KPM Program Sembako.

### A. Program PKH

Wilayah survey pelaksanaan monev KPM PKH berada di Kecamatan Seruan Hulu Desa Tumbang Manjul dengan jumlah responden secara keseluruhan adalah 5 responden. Pada umumnya semua responden menerima lebih dari satu bantuan sosial dari pemerintah, seperti Program Sembako, Program Indonesia Pintar dan BPJS Kesehatan, dan semua responden telah memiliki Nomor Induk Kependudukan, KTP Elektronik dan Kartu Keluarga.

Responden PKH di Desa Tumbang Manjul semuanya adalah wanita dengan sebagian besar pekerjaannya adalah ibu rumah tangga yang telah mendapatkan penjelasan mengenai tata cara pengambilan bantuan sosial PKH baik oleh pihak bank, petugas Dinas Sosial Kabupaten Seruan dan pendamping PKH di wilayah tersebut , meskipun ada beberapa responden yang masih kurang paham tentang penjelasan tersebut.

**Gambar 6.** Dokumentasi Verifikasi data KPM

Proses pengambilan bantuan sosial PKH oleh responden dilakukan dengan

menggunakan kartu KKS di E-Warong dengan jarak tempuh paling jauh adalah sekitar 100 m, yang dilakukan secara mandiri oleh responden yang bersangkutan. Transaksi pengambilan dana Program PKH yang dilakukan oleh responden dengan menggunakan kartu KKS di E-Warong terdekat dengan satu kali pengambilan dan penggunaan dana tersebut untuk sebagian besar untuk biaya Pendidikan, Kesehatan, membeli sembako, membeli pakaian seragam, membayar kontrakan listrik, membeli pulsa dan untuk uang jajan anak.

Responden tidak memiliki rekening di bank lain selain rekening bantuan sosial dan mereka juga tidak mengetahui transaksi keuangan elektronik/digital. Responden yang berada diwilayah desa Tumbang Manjul rata - rata tidak memiliki handphone pribadi dan yang mempunyai handphone biasanya sudah digunakan lebih dari 1 tahun baik dipakai secara pribadi maupun dipakai bersama dengan keluarga, sebagian besar menggunakan handphone biasa rata rata, sudah menggunakan lebih dari satu tahun dengan tidak pernah mengganti kartu/simcard sejak pertama kali digunakan.

Secara umum responden yang mempunyai handphone merasa tidak keberatan untuk tidak mengganti kartu/simcard mereka selama menerima bantuan sosial dari pemerintah. Kualitas signal di wilayah Desa Tumbang Manjul adalah baik untuk signal telepon seluler saja sedangkan untuk signal internet tidak ada sama sekali.



**Gambar 7.** Penyerahan Souvenir kepada KPM

### B. Program Sembako

Wilayah survey pelaksanaan monev KPM Program Sembako berada di Kecamatan Seruan Hulu Desa Tumbang Manjul dengan jumlah responden secara keseluruhan adalah 5 responden. Pada umumnya semua responden menerima lebih dari satu bantuan sosial dari pemerintah, seperti Program Sembako, Program Indonesia Pintar dan BPJS Kesehatan, dan semua responden telah memiliki Nomor Induk Kependudukan, KTP Elektronik dan Kartu Keluarga. Rata-rata pekerjaan responden PS adalah pekerja lepas seperti; petani, nelayan, pedagang kue. Jarak yang ditempuh menuju ke e-warong rata-rata sekitar 0,5 s.d. 2 km yang biasa mereka tempuh hanya dengan berjalan kaki saja.

Karena sistem pengambilan sembako secara berkelompok atau komunitas (sistem paket) sehingga KPM tidak pernah mengalami masalah dalam pengambilan sembako. Rata-rata KPM tidak memiliki HP dan sebagai penghubung aktif adalah pihak pendamping. Secara keseluruhan KPM hanya memiliki 1 Kartu KKS. Pemahaman mengenai uang digital masih belum dipahami oleh KPM di desa Tumbang Manjul.

## KESIMPULAN

Hasil monitoring dan evaluasi (monev) efektivitas layanan sistem pembayarmelalui digitalisasi bansos non tunai program PKH dan Program Sembako bagi KPM adalah sebagai berikut :

1. Perlu peran aktif pendamping dalam mengkoordinir pengambilan bantuan sosial agar memudahkan KPM dalam mengambil bantuan di e warong
2. Perlu sosialisasi peran dan fungsi e warong secara jelas agar tidak terjadi miskomunikasi dilapangan seperti pengambilan bantuan sosial di luar dari e warong, terjadinya penumpukan dalam pengambilan dan sebagainya
3. Harus adanya pengklusteran/ pengelompokkan KPM sesuai petaan tempat, jangan terlalu jauh dan proporsi pembagian tiap KPM agar dapat merata

- karena kebanyakan dalam pengambilan bansos KPM mengambil secara bebas sehingga terjadi mis dalam jumlah penyediaan barang di e-warong..
4. Daftar nama KPM harus jelas, data terus di update secara berkala agar data-data dapat terekap dengan baik dan tepat sasaran.
  5. Bank penyalur, Dinas Sosial, E warong juga harus saling berkoordinasi dalam penyaluran bantuan Sosial. Jadwal pengambilan bantuan sosial setiap tahap agar diketahui dan disampaikan kepada setiap pelaku yang terlibat dalam proses penyaluran.

### KENDALA

Adapun kendala dalam penyaluran adalah sebagai berikut :

1. Pendamping tidak melakukan rekap data penyaluran karena berharap dari data Bank Penyalur.
2. Operator belum optimal dalam membantu menyiapkan daftar bayar peserta KPM per pendamping,
3. Ada beberapa peserta KPM yang belum mengetahui jumlah bantuan yang akan diperolehnya setiap tahap dan berapa kali proses pencairan.
4. Dinas Sosial belum menentukan jadwal penyaluran bersama lembaga bayar secara baik,
5. Kondisi jalan antara rumah KSM dan lembaga bayar sulit dilalui/ terlalu jauh sehingga banyak KPM yang beralih ke Lembaga bayar selain e warong.
6. Jaringan di Wilayah Blankspot kabupaten/kota tidak memadai untuk digunakan dalam mengirim data hasil pemutakhiran.
7. Jarak Bank Penyalur di wilayah Blankspot terlalu jauh dan beresiko.
8. Faktor pendukung dan penghambat lembaga dalam penyaluran bantuan adalah kordinasi dan penyaluran bantuan. faktor pendukung dan penghambat KPM pada penyaluran bantuan adalah koordinasi dan jadwal Pencairan

9. Kebanyakan KPM mengabaikan keamanan password dengan alasan sering lupa. Sehingga yang mencatat password KPM adalah pihak pendamping atau e warong.
10. Sebelum adanya BSNT,KPM tidak pernah mengunjungi e warong,
11. Rata-rata KPM tidak memiliki Handphone selular sehingga kesulitan dalam mendapatkan informasi

### REKOMENDASI

Permintaan KPM mengharapkan Bank Penyalur untuk Wilayah Blankspot/Offline dialihkan ke Bank Penyalur yang lokasinya lebih dekat yaitu Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah (Bank Kalteng)

### DAFTAR PUSTAKA

- Candra. (2019). *Policy Brief Policy Brief Pancanaka*, 1(04), 14. [https://kebijakankesehatanindonesia.net/images/2019/policy\\_brief\\_penguatan\\_kbk\\_dalam\\_meningkatkan\\_mutu\\_rujukan\\_no\\_n\\_spesalistik.pdf](https://kebijakankesehatanindonesia.net/images/2019/policy_brief_penguatan_kbk_dalam_meningkatkan_mutu_rujukan_no_n_spesalistik.pdf)
- Fadlurrohim, I., Nulhaqim, S. A., & Sulastri, S. 2020. *Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (Studi Kasus Di Kota Cimahi)*. Share : Social Work Journal, 9(2), 122. <https://doi.org/10.24198/share.v9i2.20326>
- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. 2015. *Sistem Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Jaminan Sosial*. In *Analisis Kebijakan* (p. 123).
- Kuddus, M. (2019). *No Covariance Structure Analysis of Health-Related Indicators of Elderly at Home : Focusing on Subjective Health Title*.
- Mukrimaa, S. S., Nurdyansyah, Fahyuni, E. F., YULIA CITRA, A., Schulz, N. D., Ghassan 2017 Taniredja, T., Faridli, E. M., & Harmianto, S. 2016. *No Covariance Structure Analysis of Health-Related Indicators of Elderly People at*

*Home Focusing on Subjective HealthTitle. Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 6(August), 128.*  
<https://www.bps.go.id/publication/2016/06/29/7aa1e8f93b4148234a9b4bc3/statistik-indonesia-2016.html>

Nurul Najidah dan Hesti Lestari. (2019). *Efektivitas Program Keluarga Harapan (PkH) Di Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang*. Journal of Public Policy and Management Review, 8(2), 69–87.

Nurwati, N. (2008). *Kemiskinan : Model Pengukuran , Permasalahan dan Alternatif Kebijakan*. Jurnal Kependudukan Padjadjaran, 10(1), 1–11.

Rachman, B., Agustian, A., & Wahyudi, N.2018. Efektivitas dan Perspektif Pelaksanaan Program Beras Sejahtera (Rastra) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). *Analisis Kebijakan Pertanian*, 16(1), 1. <https://doi.org/10.21082/akp.v16n1.2018.1-18>.